

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ahmad M. Ramli, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia, Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003.
- Angela Scheneeman, The Law of Corporation, Partnerships, and sole proprietorships (New York: Delmar Publisher, 1997).
- Binoto Nadapdap, ed., Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Denis Keenan dan Josephine Bisacre, Smith and Keenan's Company Law (England: Pearson Education Limited), 2002.
- Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, Jakarta, Rajawali Pers, ed, ke-2, 2013.
- Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius, Jakarta, Stora Grafika, 2001.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan: Jakarta, 1979.
- Habib Adji, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2005.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Hukum Inggris Indonesia, Gramedia Utama, Jakarta, 2012.
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

- M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011.
- \_\_\_\_\_, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bakti, Medan, 2001.
- Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Tentang Jabatan Notaris). PT. Refika Aditama, di Indonesia suatu Penjelasan. Grafika Offset, Jakarta, Bandung, 2004.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Rosenoer, Jonathan, CyberLaw: The Law of The Internet, Springer-Verlag, New York, 1996.
- S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, cet. ke-12, 2002.
- Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Jabatan Notaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Schaefer, AJ (1997). "EMS - Electronic Meeting System - Unterstuetzung für das Meeting Management im Architekturbetrieb, Hannover, Germany, November 1997.
- Sentosa Sembiring, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Siregar, Riki R. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce, 2010.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.

Soedjono Dirjosisworo. Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia. Mandar Maju: Bandung, 1997.

Sjaifurrachman, Aspek-aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi, PT. Bumi Aksara, cetakan pertama, Jakarta, 2009.

Yudha Pandu, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

## **C. Makalah, Artikel dan Internet**

Amelia Sari Kusuma Dewi, Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015.

Ribka Angelia M Sianipar, Jurnal Indonesia terakreditasi Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 k/pdt/2011.

